

Hand Book

MATA KULIAH : SEJARAH PENDIDIKAN

DOSEN : Dra. Erlina Wiyanarti, M.Pd

Drs. Wawan Darmawan, M.Hum

A. Pendahuluan

Pendidikan dan sejarah atau sejarah dan pendidikan tidak dapat dilepaskan satu sama lain karena kedua – duanya mempunyai nilai guna (*use value*) intrinsik yang sama. Pendidikan sejarah berguna bagi manusia agar mampu belajar dari pengalaman, dari masa lalu dimana kebijakan dan kearifan masa kini terbentuk. Sedangkan dari sejarah pendidikan manusia memperoleh guna manfaat belajar tentang bagaimana memaknai pendidikan di masa kini sebagai proses akumulasi pendidikan di masa lalu, dan mengambil keputusan dalam upaya menentukan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa kini dan bagi kebaikan masa depan.

Pengajaran sejarah pendidikan dan penelitian serta penulisan sejarah pendidikan di Indonesia masih belum banyak mendapat perhatian yang serius, tidak seperti sejarah politik atau sejarah sosial yang pada beberapa dasawarsa terakhir ini mendapat perhatian besar dari kalangan sejarawan Indonesia. Demikian pula historiografi pendidikan di Indonesia nasibnya tidak jauh berbeda. Para sejarawan dewasa ini masih lebih tertarik kepada sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah agraria, sejarah petani dan sejarah kawasan. Sehingga tidak mengherankan buku – buku yang sering mendapat perhatian para elit masyarakatpun lebih banyak yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan politik, sekalipun pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk mengembangkan perekonomian dan berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya sangat tergantung kepada tingkat pendidikan yang dimiliki.

Sejarah telah membuktikan bahwa pendidikan telah teruji mampu membawa dunia dari kegelapan dan kesempitan menjadi dunia yang benderang dan lapang, global dan universal. Seperti di katakan oleh Compayre bahwa tidak berlebihan jika “*L`education d` un peuple Est a la fois le resume de tout cequ`il croit et la source de tout ce qu`il sera*” artinya pendidikan manusia adalah resume dari semua yang telah tumbuh

dan sekaligus menjadi sumber dari semua yang akan datang, dengan kata lain pendidikan dapat dikatakan turut membentuk jiwa suatu bangsa.

Ruang cakup sejarah pendidikan sebenarnya hampir seluas sejarah pada umumnya. Bahkan ada di katakan bahwa inti dari suatu peradaban sesungguhnya adalah pendidikan, dimana upaya – upaya untuk mengalihkan kebudayaan kepada generasi berikutnya, dan bagaimana pikiran – pikiran, nilai – nilai, kepercayaan dan keyakinan telah di ajarkan dari generasi ke generasi. Oleh karenanya sejarah pendidikan sesungguhnya tidak saja perlu bagi mahasiswa pendidikan, mahasiswa sejarah, pakar – pakar pendidikan dan para sejarawan pendidikan, tetapi penting di ketahui oleh mahasiswa jurusan – jurusan dari faukultas - fakultas lain di LPTK yang sama, dan tentunya juga bagi para pengambil keputusan. Betapa tidak masa depan bangsa ikut ditentukan oleh kebijakan – kebijakan pendidikan di masa kini, dan agar kita bijak dalam mengambil kebijakan pendidikan di masa kini sudah seharusnya belajar dari pendidikan di masa lalu.

Sejarah pendidikan merupakan sumber pengalaman bagaimana dasar, fungsi, tujuan pendidikan, jenis, jenjang, peserta didik, tenaga kependidikan, tenaga pendidik, kurikulum, sumberdaya pemikiran, kurikulum telah di kembangkan dari waktu ke waktu.

B. Historiografi Pendidikan Baru Sebuah Wacana

Historiografi pendidikan di Indonesia nasibnya masih kurang mendapat perhatian. Menurut Sjamsuddin (2005) kemungkinan penyebabnya antara lain adalah para sejarawan masih lebih tertarik pada kajian tema non pendidikan, sementara sejarawan pendidikan yang ada belum benar – benar bersedia mengkhususkan diri untuk spesialisasi di bidang sejarah pendidikan.

Masalah lain yang juga di soroti oleh Syamsuddin adalah model pendekatan historiografi pendidikan di Indonesia. Hingga sekarang menurut dia historiografi pendidikan Indonesia pada umumnya masih menggunakan pendekatan konvensional atau klasik, dimana pengajaran, penulisan dan penelitiannya di kembangkan berdasarkan kerangka pemikiran yang bersifat diakronis-ideografis-partukulairitik, dan di sajikan dalam pola kronologis-diakronik-linier-deskriptif-naratif. Sedangkan pokok kajian masih di arahkan pada sejarah ide- ide dan pemikir – pemikir dalam bidang pendidikan. Sebagai

contoh di kemukakan beberapa buku yang pernah di tulis seperti “*Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlands-Indie*” yang terbit tahun 1938 dari Brugmans, dimana sejarah pendidikan disajikan mulai dari masa pendidikan Hindu-Budha, masa Islam sampai masa pemerintahan kolonial Belanda; buku lainnya adalah “ Aliran – aliran Baru Dalam Pendidikan Dan Pengajaran “ di tulis oleh Sugarda Poerbakawatja terbit tahun 1962; trend yang masih sama di temukan pada buku – buku sejarah pendidikan tahun 1980-an yakni yang tentang sejarah pendidikan di setiap provinsi melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, dimana sistematika yang seragam, sejak dari pendidikan tradisional khas daerah masing – masing yaitu zaman Hindu-Budha, masuk Islam, kedatangan bangsa – bangsa Barat, Jepang, sampai masa kemerdekaan dan sesudahnya; tahun 1990-an muncul dua buku yakni “*Koloniaal Onderwijs en onderwijs Beleid in Nederlands-Indie 1893-1942*” di tulis oleh J.E.A.M. Lelyveld terbit tahun 1992 dan setahun kemudian terbit buku dari G.M.J.M. Koolen yang berjudul “ *Een Seer Bequaem Middel Onderwijs en Kerk Onder 17e Eeuwse VOC* “ tetapi masih dengan pola penulisan yang sama; tahun 1996 Prof.Dr.Wardiman Djojonegoro menulis buku berjudul” Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Di Indonesia “, bahkan yang diterbitkan tahun 2000-an sekalipun seperti buku “Guru Di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya sejak zaman Kolonial Hingga Era Reformasi” dari Prof.Dr. Dedi Supriadi, masih di tulis dalam pola konvensional.

Historiografi pendidikan baru seyogyanya di kembangkan berdasarkan pendekatan historiografi baru (*The New History*) pula, yang memandang bangunan kehidupan manusia sebagai fenomena multi aspek dimana setiap aspek yang menjadi pilarnya tidak bisa dipisah- pisahkan sekalipun atas nama pengembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan sebagai salah satu aspek dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas perkembangannya dari aspek yang lain seperti politik, sosial ,budaya bahkan teknologi sekalipun. Pendekatan historiografi pendidikan baru, merujuk pada pemikiran Kartodirdjo (1987,1992) harus dikembangkan dengan memanfaatkan teori dan konsep ilmu – ilmu sosial (multidisiplin). Disamping itu dengan asumsi bahwa pendidikan merupakan bagian integral dalam sistem kehidupan sosial masyarakat yang mengandung berbagai aspek (dimensi), dengan kata lain perkembangan pendidikan baik dalam perspektif kelampauan, kekinian bahkan masa datang tidak bisa lepas dari daya – daya

sosial maupun teknologis lain yang mempengaruhinya, maka historigrafi pendidikan harus pula menggunakan pendekatan yang bersifat multidimensi.

Dengan pendekatan baru tersebut para sejarawan pendidikan dalam penelitian dan penulisannya di dorong untuk memperhatikan aspek – aspek lainnya yang terkait dan relevan. Sehingga dengan pendekatan tersebut akhirnya diperoleh analisis yang holistic menyeluruh tetapi tetap dalam dan tentu saja bermakna baik dari substansi maupun kebermaknaanya. Dengan kata lain, sekalipun telah diyakini bahwa inti peradaban adalah pendidikan, namun untuk dapat memahaminya secara utuh maka pendidikan harus dipandang sebagai fenomena yang tidak berdiri sendiri. Dan pola pendekatan tersebut jika dikembangkan akan membuat penelitian dan penulisan bahkan pengajaran sejarah pendidikan akan menjadi semakin menarik dan semakin penting.

Di negara – negara maju menurut Manuel de Puelles Benites dalam Syamsuddin (2005) dituturkan bahwa dewasa ini historiografi pendidikan sudah mengalami pergeseran kearah yang lebih terbuka dan lebih menyeluruh , seperti yang tertuang dalam ungkapan berikut ini yang dimuat dalam sebuah jurnal internasional sejarah pendidikan :

“Nowdays studying the history of education has become fascinating and complex task in its attempt to explain how education has become an institutional reality deeply imbuded with process of wider social, economic, and political nature. The historian of education cannot avoid the connection between these processes and the pedagogical fact.”

Berdasarkan kajian terhadap pemikiran – pemikiran tersebut di atas penulis setuju dengan pendapat Prof.Dr.Helius Syamsuddin, bahwasanya Sejarah pendidikan harus dikemas kembali dengan perkembangan metodologi sejarah dan isi yang baru sesuai dengan temuan informasi – informasi baru atau dengan interpretasi dan penjelasan yang baru. Konsekuensinya adalah dalam historigrafi pendidikan baru harus mengandung adanya perpaduan cara – cara khas sejarah yang diakronis-ideografis-partukularistik – untuk kepentingan analisis – dengan cara- cara ilmu sosial yang sinkronik-nomotetik-generalistik. Dan untuk upaya pepaduan tersebut sebaiknya menggunakan pendekatan baik yang bersifat interdisipliner, multidimensional, komparatif maupun problematik.

Pendekatan interdisiplin ditandai dengan adanya pola saling mendekat antara sejarah dengan ilmu – ilmu social (*rapprochement*). Proses saling mendekat lebih

dimungkinkan lagi manakala berkaitan dengan objek kajian sejarah dan ilmu – ilmu sosial adalah sama yaitu manusia. Sementara dengan pendekatan komparatif para sejarawan bisa melakukan kaji banding mengenai pelaksanaan pendidikan di masa lalu di beberapa wilayah baik antar wilayah di Indonesia , maupun dengan luar Indonesia. Melalui pendekatan tersebut sejarawan dapat menemukan keunikan , kelebihan dan kekurangan, keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pendidikan. Sedangkan pembekatan problemaik memberi peluang kepada sejarawan untuk menemukan, menandai, menginventarisir kemudian menyeleksi masalah - masalah atau isu- isu yang diindikasi berulang pada masa yang berbeda.

Pemaduan cara pandang atau metodologi konvensional dan mutakhir serta penggunaan tiga pendekatan tersebut di atas dalam historiografi pendidikan baru, akan semakin memperkaya dan mempertajam analisis yang di lakukan oleh para sejarawan pendidikan. Kajian sejarah pendidikan yang bersifat *holistic* bukan lagi sesuatu yang tidak dapat direalisasikan.

C. Pembangunan Pendidikan Dalam Perspektif Sejarah

Keterkaitan antara pembangunan dan pendidikan diakui oleh berbagai peneliti. Fakta – fakta sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan suatu bangsa ikut ditentukan oleh perkembangan pendidikannya. Untuk itulah pada paparan berikut ini akan dibahas tentang kerangka pemikiran dan fakta – fakta historis yang menunjukkan bahwa asumsi tersebut benar.

C.1. Kerangka Teori

Fokus pembahasan dalam bagian ini adalah tentang variasi – variasi yang terdapat dalam diskripsi –analitis perkembangan pendidikan di beberapa negara berdasarkan geokultural. Di dalam membahas perbedaan – perbedaan intraregional dan interregional, perhatian akan diarahkan kepada masalah kuantitatif dan kualitatif masyarakat, serta karakteristik pendidikan yang terpilih, untuk mengilustrasikan keadaan masalah perkembangan di suatu negara. Pemilihan negara tertentu sebagai studi kasus lebih di dasari oleh keterwakilan setiap region dan kebermaknaan dilihat dari realita bahwa negara tersebut bisa dijadikan ukuran rata – rata. Kajian tentang perkembangan pendidikan di Indonesia mendapat prioritas utama baik dari segi substansi maupun

kepentingan, terkait dengan upaya pencapaian tujuan perkuliahan Sejarah Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.

Pembangunan merupakan konsep yang dikembangkan dalam pemikiran paradigma kaum developmentalis – fungsionalis . Pembangunan dalam pandangan mereka dimaknai sebagai proses yang mengandung tahapan – tahapan yang dirancang secara cermat, sistematis dan logis, dengan memperhatikan fungsi – fungsi dari setiap aspek yang menjadi bagian dari sistem kehidupan masyarakat Ritzs (2001). Kompleksitas merupakan fenomena yang harus dipahami di dalam mengkaji pembangunan sebagai fenomena perkembangan suatu masyarakat. Paralel dengan pemikiran tersebut, Smelser (1992) menuturkan bahwa salah satu aspek yang menjadi ukuran keberhasilan suatu pembangunan adalah faktor pendidikan. Bahkan beberapa ahli menggunakan kemajuan pendidikan sebagai standar keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Tidak ada yang melebihi tantangan dan kompleksnya tugas dalam rangka memenuhi aspirasi dasar penduduk dunia kecuali usaha untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan melalui peningkatan baik kualitas maupun kuantitas pendidikan dalam pembangunan setiap bangsa.

Egon (2004) mengatakan bahwa dalam pemikiran yang lebih mendasar pembangunan adalah suatu proses pendidikan; pembangunan adalah dialog manusia dengan alam lingkungan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karenanya melalui pendidikan itulah masyarakat belajar mengerti dan merubah hubungannya dengan alam serta lingkungan sosialnya secara konstruktif. Pendidikan telah menjadikan manusia menyadari arti kehadirannya di muka bumi ini. Pendidikan merupakan wahana perubahan sosial . Sehingga tidak heran muncul pandangan yang cenderung menjadi suatu keyakinan, bahwa pendidikan merupakan kunci untuk mencapai tujuan – tujuan seperti pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, kesatuan nasional dan lain sebagainya.

C.2. Sejarah Pendidikan Indonesia.

Vloemans mengatakan bahwa pendidikan itu berarti “pemberian pengertian dan contoh”. Berdasarkan pemikiran tersebut teranglah bagi kita bahwa dalam masa prasejarah bangsa kita telah mengenal “pendidikan “. Pendidikan pada masa ini

dipengaruhi oleh pola dan tingkat berfikir masyarakat yang masih sangat di dominasi atau tergantung kepada alam. Sehingga tidak heran kalau Joned dan Notosusanto (1990) berusaha menggambarkan betapa kentalnya pengaruh sistem kepercayaan dan sistem mata pencaharian terhadap pendidikan jaman itu. Tujuan, materi, metode, media dan evaluasi pembelajaran, berdasarkan studi banding terhadap masyarakat yang masih dalam tahap hidup sangat sederhana, kemungkinan besar masyarakat zaman prasejarah di Indonesia, bersifat langsung, praktis, serbaguna dan efisien melalui proses pembelajaran dengan contoh – contoh dalam kehidupan sehari – hari (Said dan Affan,1987).

Pada abad ke-5 sebagian masyarakat Tarumanagara telah dapat membaca dan menulis. Dengan kemampuannya tersebut mereka menerima pengajaran membaca dan menulis. Bukti yang memperkuat adalah ditemukannya prasasti di dekat Desa Batutulis Bogor, prasasti Tugu di Jakarta maupun prasasti – prasasti yang lain . Prasasti tersebut menggunakan huruf Palawa (*palawaschrift*) yang berasal dari India (tanah Hindu). Kalau kita juga tambahkan bahwasanya Tarumanagara telah memiliki hubungan luar negeri juga dengan kekaisaran Cina pada waktu itu, maka tidak di ragukan lagi para utusan yang dikirim pasti pernah mendapat pendidikan mengenai keahliannya. Hanya yang jelas sistem pendidikannya belum menggunakan sistem klasikal atau sekolah formal.

Kemungkinan kemampuan membaca dan menulis bangsa Indonesia lebih di perkuat lagi manakala para ahli menemukan dan membaca prasasti yang berasal dari kepulauan Nusantara abad 7 M. Sebut saja kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah. Keberadaan prasasti – prasasti yang ditemukan di kerajaan Sriwijaya membuktikan bahwa ketrampilan membaca-menulis dan berhitung sudah berkembang di banding jaman sebelumnya. Betapa tidak Sriwijaya sebagai kerajaan maritim pada jamannya di kunjungi oleh berbagai saudagar terutama dari India dan Cina. Untuk menjadi kota niaga di jalur perdagangan internasional tentu di butuhkan tenaga – tenaga terampil dalam kebahasaan (penterjemah) dan tenaga pembukuan(hitung – menghitung), dan untuk kepentingan itulah Wolters (1970) berpendapat bahwa di kerajaan Sriwijaya telah ada lembaga pendidikan ketrampilan yang dibutuhkan tersebut. Demikian pula di kerajaan yang telah meninggalkan monumen – monumen mengagumkan seperti Borobudur, Prambananan dan candi – candi lainnya serta

peninggalan berupa karya sastra yang besar, tidak mungkin tidak ada lembaga yang mendidik tenaga – tenaga ahli maupun tenaga pelaksana. Untuk menganalisa kemungkinan tersebut maka pendapat Joned dan Notosusanto (1990) bisa dipertimbangkan. Dalam bukunya dipaparkan bahwa kemungkinan besar di kerajaan – kerajaan seperti Mataram Kuno, Kediri, Singosari dan Majapahit ada multi sistem pendidikan yakni pertama pendidikan yang dilakukan di Istana yang difokuskan mendidik para siswa yang berasal dari keluarga bangsawan dan yang dipelajari adalah materi utama tentang politik pemerintahan yang dilengkapi dengan ilmu – ilmu lainnya kecuali agama; alur kedua di laksanakan di biara – biara yang mendidik para calon pendeta atau rahib yang berasal dari golongan masyarakat atau kasta brahmana (untuk kalangan Hindu) yang tentu saja materi yang dipelajari adalah kitab – kitab agama di tambah *cilpasastra*; alur ketiga pendidikan di padepokan milik para empu yang mengajarkan ketrampilan seperti membuat keris, pedang, mengukir dan memahat serta kerja tangan lainnya yang dibutuhkan pada jamannya (Depdikbud,1992). Sekalipun demikian apapun alur pendidikan pada masa itu, apakah di lingkungan istana, biara maupun di bengkel-bengkel, sistem pembelajaran dilakukan secara langsung dengan metode penyampaianya teknik magang dan tidak menggunakan sistem klasikal. Pembelajaran bersifat individual sehingga hubungan siswa dengan guru sangat dekat dan hubungan psikologis di bangun di atas pola “Guru- Kula.”

Pola Guru – Kula ini pula yang disinyalir oleh beberapa pakar sejarah kemudian berlanjut hingga masuk dan berkembangnya pengaruh budaya Islam. Pola bisa bersifat kontinyuiti tetapi substansi materi pembelajaran tentu mengalami perubahan yakni yang tadinya yang di ajarkan substansi agama Hindu dan Budha, maka pada masa perkembangan pengaruh budaya Islam maka materinya adalah agama Islam. Pada masa ini pelajaran mulai dengan membaca Al Qur`an, menghafal Hadis dan komentar – komentar yang telah disusun oleh imam – imam besar yang terkemuka. Lembaga pendidikan Islam di wilayah Timur tengah pada masa klasik sebelum adanya madrasah, menurut Makdisi dalam Nata (2004) antara lain *adalah shuffah, kuttab/maktab, halaqah, majlis*, masjid, rumah – rumah ulama, dan perpustakaan . Setiap lembaga pendidikan tersebut memiliki karakteristik masing – masing. Dari sekian institusi yang pernah ada tersebut, yang berkembang di Indonesia cenderung merupakan percampuran

antara pola *maktab*, *halaqah*, *masjid* dan rumah – rumah ulama. Dan lembaga pendidikan di maksud adalah pesantren. Ada pendidikan yang levelnya di bawah pesantren yakni Langgar, Rangkang atau Surau yang pembentukannya lebih kepada inisiatif sekelompok orang yang ingin anak – anaknya belajar membaca Al Qur`an. Sedangkan di Pesantren anak – anak mendapat pelajaran agama yang lebih mendalam. Menurut Steeinbrink (1987) perkembangan Pesantren pada bentuk awalnya, seperti halnya penyebaran agama Islam, tidak bisa lepas dari peranan para tokoh ulama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo dan tokoh – tokoh lainnya. Pendapat itu di diperkuat oleh Azra (1999) yang menyatakan bahwa perkembangan agama Islam dan dinamikanya di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari peranan para tokoh intelektual keagamaan atau ulama yang memang sudah memiliki jejaring dengan para tokoh ulama di Timur Tengah, baik dari aliran Sunni maupun Syiah.

Sebagai contoh Pesantren yang diperkirakan tertua di Indonesia mula – mula didirikan oleh Sunan Ampel atau Raden Rakhmat di daerah Kembang Kuning Surabaya. Pola pendirian pesantren yang sedikit berbeda bisa kita lihat dari sejarah berdirinya pesantren Tegalsari Ponorogo yang pada tahun 1742. Pesantren tersebut tidak di dirikan oleh mualim atau ulama besar sebagaimana umumnya, melainkan oleh Pakubuwonoo II sebagai anugrah kepada penduduk setempat (Poesponegoro dan Notosusanto,1990). Model yang hampir sama ditemukan di daerah Priangan, dimana pesantren ada di setiap ibu kota kabupaten dan pendiriannya menjadi bagian dari kebijakan para *Regent* atau Bupati . Berdasarkan temuan – temuan tersebut, keberadaan Pesantren erat kaitannya dengan keberadaan tokoh pemuka masyarakat, baik dari kalangan ulama, priyayi maupun menak yang menjadi bagian dari struktur pemerinatahan kolonial. Seiring dengan waktu kemudian banyak pesantren – pesantren di dirikan hingga bentuk Pesantren moderen dewasa ini. Pada umumnya di pesantren tradisional dikembangkan metode belajar yang disebut *bandungan* dan *sorogan* yang di berikan secara individu atau paling tidak semi klasikal.

Satu lagi lembaga pendidikan Islam yang juga mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia yakni Madrasah. Lembaga ini sifatnya lebih terbuka dimana yang dipelajari tidak melulu pelajaran agama tetapi di tambah pelajaran tentang ilmu pengetahuan lain. Menurut Bulliet dalam Maksom (1999) pola madrasah pertama

didirikan sekitar abad ke-11 di daerah Persia. Namun kemudian menurut Akmansyah dalam buku yang sama, yang paling terkenal adalah madrasah Nizhamiyah di sekitar Baghdad yang di dirikan oleh Nizam-el Mulk pada awal abad ke-12. Bahkan Yunus (1992) menuliskan karena terkenalnya madrasah tersebut pernah dikunjungi oleh Ibnu Batutah pada abad ke-14 M. Gaung madrasah akhirnya sampai juga ke Indonesia, sekalipun yang sampai bukan aliran yang dari Baghdad maupun Persia, tetapi dari Mesir dalam waktu yang lebih kemudian. Mokhammad Abduh sebagai pemikir pendidikan Islam moderen melakukan transformasi dari pendidikan Islam tradisional menuju pendidikan Islam moderen. Salah satu gagasannya adalah mengubah madrasah sebagai institusi pendidikan yang masih di dominasi oleh pendidikan tentang agama Islam, menjadi institusi pendidikan yang memberi peluang yang seluas- luasnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan keduniaan. Dan pola inilah kemudian yang dikembangkan di Indonesia sehingga tidak jarang disebut sebagai "Pesantren Moderen". Dan pada masa kemerdekaan dijadikan sebagai institusi pendidikan formal dimana kurikulum dan tenaga pengajarnya di rancang oleh dua departemen terkait yakni Departemen Agama dan Departemen Pendidikan.

Dari fakta – fakta perkembangan pendidikan baik pada masa pengaruh Hindu-Budha maupun masa Islam, dapat diperoleh sebuah generalisasi bahwa sebagain besar perkembangan pendidikan masyarakat pada tersebut tidak bisa dilepaskan dengan proses dan upaya penyebaran agama. Adapun pendidikan lain yang tidak menonjolkan dimensi keagamaan lebih bersifat pendidikan terapan atau ketrampilan yang di butuhkan oleh masyarakat. Sifat pendidikan bergerak antara tataran informal dan nonformal, kecuali Madrasah di era pasca kemerdekaan. Demikian pula di era pengaruh Portugis. Pendidikan jaman Portugis tidak bisa lepas dari institusi keagamaan dalam hal ini gereja.

Misi pengembangan agama Khatolik tidak dapat dipungkiri pengaruhnya sangat dominan dalam pengembangan pendidikan pada masa Portugis. Kenyataan tersebut seperti diungkapkan oleh Said dan Affan (1987) bahwasanya pendirian sekolah – sekolah oleh Portugis tidak lain merupakan bentuk dari pola penyebaran agama Katholik. Sehingga tidak mengherankan jika sekolah guru yang pertama di Indonesia (Maluku-Ternate) didirikan oleh Gereja Khatolik. Demikian pula lulusan yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi mereka dikirim ke Goa (India) untuk

mengikuti perkuliahan di universitas keagamaan. Jika memang pendidikan adalah bagian dari misi gereja, maka peranan tokoh dari Ordo Yesuit bernama Franciscus Xaverius harus diakui sebagai pelopor pendidikan Barat (Kristen) di Indonesia.

Perkembangan pendidikan mengalami perubahan manakala Belanda mulai mengembangkan sayap kekuasaannya di Indonesia, sekalipun awalnya melalui kongsi dagang mereka (VOC). Perbedaannya tampak jelas dari sekolah – sekolah yang pertama didirikan banyak yang berorientasi pendidikan non agama. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena VOC adalah kongsi dagang jadi orientasinya adalah aspek – aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi (perdagangan). Memang ada sekolah – sekolah yang didirikan oleh para Zending tetapi sifatnya lebih kepada untuk membendung pengaruh Portugis dengan Khatoliknya, sehingga sekolah – sekolah yang didirikan oleh VOC awalnya terkonsentrasi di daerah yang dimana pengaruh Portugis kuat. Sehingga pada tahun 1695 di Maluku sudah ada 1057 murid dan 13 tahun kemudian di Ambon saja sudah ada 3966 murid. Sedangkan di daerah yang dipengaruhi Portugis lainnya, yaitu pulau Timor juga di buka sekolah – sekolah yang intinya untuk membersihkan pengaruh Portugis. Keadaan mulai berubah ketika VOC membutuhkan tenaga kerja untuk pengembangan administrasi dan pengamanan. Untuk kepentingan itu baik di Ambon, Batavia maupun Jawa Tengah didirikan sekolah – sekolah ketrampilan mulai dari sekolah dagang, sekolah pelayaran hingga sekolah militer, yang berdampak dengan sekolah Zending yang telah lebih dulu ada.

Abad 19, setelah Indonesia langsung dibawah kekuasaan pemerintah kerajaan Belanda, perkembangan pendidikan tidak serta merta berubah, karena hingga tahun 1830-an keadaan tidak terlalu berbeda dengan jaman VOC. Sekolah bagi anak – anak Eropa di bedakan dengan sekolah untuk kaum Pribumi. Sekolah Dasar yang pertama didirikan adalah untuk kepentingan anak - anak Belanda yakni ELS, walaupun ada juga anak – anak pribumi yang masuk di sekolah tersebut tetapi jumlahnya sangat sedikit. Dibukanya kesempatan yang lebih luas bagi anak Pribumi bersekolah bersekolah, di lakukan pada masa Van Den Bosch menjadi Komisaris Jenderal. Itupun karena bukan karena ingin memajukan anak – anak pribumi melainkan karena pelaksanaan Sistem Tanam Paksa membutuhkan pegawai rendahan yang pandai tulis baca dalam jumlah banyak. Kemudian berdirilah sekolah yang berbahasa pengantar bahwa Belanda untuk anak

pribumi dari kalangan priyayi atau menak di Ambon, Menado, Magelang dan Bandung. Adanya prioritas pendidikan bagi kaum priyayi atau menak dari pemerintah kolonial, menurut Dannys Lombard (1996) menjadi sangat jelas manakala kita melihatnya dari aspek sosial budaya, dimana kaum elit pribumi secara perlahan menjadi golongan pribumi yang memiliki etos budaya yang ingin semakin dekat dengan budayanya orang – orang Belanda. Dan ini dianggap sebagai potensi yang harus dimanfaatkan dalam memperkokoh sistem budaya pengabdian yang akan digunakan di dalam sistem kepegawaian kolonial . Dan pemerintah berhasil dalam hal ini, terbukti jika pada tahun 1870 ada 266 anak pribumi sekolah di sekolah Untuk anak Eropa, maka pada tahun 1900 menjadi 2000 orang (Furnivall,1944).

Pendidikan tingkat dasar hingga tahun 1892 yang dibiayai oleh pemerintah ada tiga jenis sekolah yakni ELS, Sekolah Kelas Dua (untuk anak dari kalangan rakyat biasa dengan pengantar bahasa Melayu dan pelajaran CALISTUNG) dan Sekolah kelas Satu (untuk anak – anak pegawai Hindia Belanda dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan Melayu, pelajaran selain CALISTUNG juga ilmu bumi, sejarah dan ilmu hayat). Dan seiring dengan semakin meningkatnya gerakan Humanisme di negeri Belanda maka kesadaran akan perlunya mendidik orang – orang pribumi sebagai balas budi muncul dikalangan intelektual Belanda. Demikian pula di kalangan para Bupati muncul kesadaran yang ditindak lanjuti oleh pendirian Sekolah Desa (*Volgschool*) swadana. Derasnya tuntutan perubahan dan juga kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih baik untuk mengisi keperluan tenaga kerja di kantor- kantor pemerintahan (karena ada perluasan sistem administrasi Barat) maka didirikan sekolah atau meningkatkan status sekolah untuk keperluan tersebut. Misalnya Sekolah Kelas Satu dirubah statusnya menjadi HIS (sekolah dasar pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan kurikulumnya sama sama dengan SD di negeri Belanda), sementara Sekolah Kelas Dua dihapuskan karena dianggap beban dalam pembiayaannya), Sekolah Desa di naikan sttusnya menjadi sekolah dasar yang mendapat subsidi pemerintah, dan di kemudian hari lulusannya bisa melanjutkan ke sekolah menengah dengan terlebih dahulu menempuh Sekolah Sambungan selama 2 tahun; sedangkan untuk anak – anak keturunan Tionghoa disediakan HCS yang bersifat swadana tapi dengan pengawasan pemerintah.

Sekolah tingkat menengah baru didirikan sekitar tahun 1912-an kemudian mengikuti sekolah menengah tingkat atas. MULO setingkat SMP dan AMS, HBS setingkat SMA. Bagi anak – anak pribumi sekalipun lulusan HIS pada awalnya sangat sulit untuk masuk ke MULO maupun AMS apalagi HBS. Selain itu sekolah kejuruan tingkat menengahpun mulai dikembangkan secara serius, baik sekolah teknik, pertanian maupun perdagangan. Sedangkan sekolah tinggi lebih kemudian lagi didirikannya, seperti *Technische Hooge School* (sekarang ITB), *Geneeskundige Hooge School* (Sekolah Dokter Tinggi) , *Rechts Hoge School* (Sekolah Hukum Tinggi) dll.

Jika dihitung secara umum sistem pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Belanda perlu 110 tahun untuk menjadi suatu sistem pendidikan yang lengkap dan utuh. Dengan kata lain jika sekolah dasar sudah dibangun tahun 1808 (ELS) maka sekolah tingginya baru ada tahun 1917 (THS), meminjam istilah Nasution (1985) perkembangannya sangat lambat (gradualis). Dan oleh karena itu gradualis merupakan salah satu sifat pendidikan jaman kolonial Belanda. Sedangkan sifat lainnya menurut Nasution dalam buku yang sama adalah dualistis, konkordanis dan pengawasan yang sangat ketat. Dualistis di maknai bahwasanya ada dua jenis pendidikan yakni yang berbahasa Belanda dan tidak, dan juga diartikan pendidikan yang rasialis untuk kaum bumiputra dibedakan dengan untuk orang Belanda dan Cina. Sementara sifat konkordansi dianggap menyulitkan bagi anak – anak bumiputra untuk lulus dengan nilai tinggi karena materi ujiannya di samakan dengan sekolah – sekolah di Belanda dimana fasilitas belajar sangat memadai dibanding dengan di Hindia Belanda. Sedangkan pengawasan yang ketat di kaitkan dengan aspek supervisi sekolah dan kepegawaiannya.

Selain sekolah – sekolah yang didirikan oleh pemerintah, berkembang pula sekolah – sekolah yang didirikan oleh kaum pribumi yang sifatnya ingin mengisi kelemahan – kelemahan pendidikan bagi kaum pribumi, yang didirikan oleh pememrintah. Bagi mereka pendidikan bukan membuat pemuda Indonesia menjadi orang Belanda berkulit coklat, tetapi pendidikan harus dimaknai sebagai upaya agar anak – anak pribumi menjadi anak – anak Indonesia yang berbudaya Indonesia, beragama dan terampil. Untuk itulah dengan semangat pendidikan yang progresif , Soerwardi Soeryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) mendirikan Sekolah Taman Siswa, Mohd Syafei mendirikan sekolah Kayutanam (INS), Kyai H. Achmad Dahlan

mendirikan sekolah Muhammadiyah dan lain sebagainya. Sekolah – sekolah swasta tersebut ternyata diminati oleh kalangan pribumi. Manakala sekolah – sekolah tersebut semakin besar maka mulai diawasi dengan ketat karena ditakutkan akan menjadi suatu kelompok yang anti pemerintah dan dianggap membahayakan posisi pemerintah kolonial. Untuk itulah dikeluarkan Undang – Undang Sekolah Liar (sekolah – sekolah swasta tersebut dianggap sebagai sekolah liar), dan banyak korban dari penerapan kebijakan tersebut. Sikap pemerintah tersebut sesungguhnya akibat dari sistem pengawasan yang ketat dari aspek administrasi .

Berdasarkan pemaparan tentang perkembangan pendidikan pada masa kolonial Belanda, maka ada empat sifat yang menonjol yakni (1) dualistis, sekolah dibedakan antara untuk anak pribumi dengan anak Belanda dan Tionghoa, juga dibedakan berdasarkan bahasa pengantarnya, ada yang berbahasa Belanda dan yang berbahasa Melayu dan daerah. Sangat diskriminatif; (2) gradualis, sistem sekolah dikembangkan sangat lambat dari level ke level lainnya, sehingga perlu seratus tahun lebih Indonesia memiliki sistem pendidikan yang lengkap; (3) konkordansi, kurikulum dan sistem ujian di samakan dengan sekolah di negeri Belanda; dan (4) pengawasan yang sangat ketat. Dan semua sifat- sifat tersebut lebih banyak merugikan bagi pendidikan kaum pribumi dari pada menguntungkan. Sekalipun demikian kita juga tidak dapat menafikan bahwa pendidikan Barat telah memberi peluang kepada orang – orang pribumi untuk mengisi jabatan yang dahulunya khusus dicadangkan bagi ”kasta” Eropa.

Sifat – sifat tersebut baru dihilangkan pada jaman pendudukan Jepang. Sistem pendidikan berlaku untuk semua orang tidak ada pembedaan. Kemudian institusi persekolahan di sederhanakan demikian pula bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di samping bahasa Jepang. Kebijakan – kebijakan yang populis tersebut tidak semata – mata di dasari ketulusan demi kemajuan bangsa Indonesia , melainkan untuk kepentingan Jepang dalam memenangkan hati bangsa Indonesia agar berani dan setia kepada Jepang dalam memenangkan peperangan pada Perang Pasifik. Propaganda tersebut diselubungkan dengan sifat kebijakan yang seolah – olah membebaskan bangsa Indonesia. Namun demikian kebijakan tersebut juga harus diakui, bahawa pola perlakuan yang sama memberi semangat dan tumbuhnya kebersamaan di kalangan pemuda – pemuda Indonesia yang akhirnya mengantarkan bangsa ini pintu kemerdekaan.

Perkembangan pendidikan dalam rangka membangun bangsa semenjak kemerdekaan memberikan gambaran yang penuh kesulitan tetapi memberikan secercah harapan. Kesulitan yang pertama adalah banyaknya gedung – gedung dan perkengakapan sekolah yang rusak dan bahkan dibumihanguskan sebagai akibat dari perang, dan dilanjutkan dengan adanya upaya – upaya Belanda untuk masuk kembali ke Indonesia. Guru – guru dan murid –murid banyak yang telah iktu bergerilya menentang Belanda. Dalam pada itu usaha penting dari pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan adalah mengangkat tokoh – tokoh pendidikan yang telah berjasa. Ki Hadjar Dewantoro diangkat menjadi Menteri Pengajaran yang pertama, Demikian juga Moch Syafei dan Mr Suwandi pernah menduduki jabatan penting di kementerian pendidikan.

Setelah 5 tahun masa revolusi, dalam rangka membangun landasan hukum bagi pengembangan bidang pendidikan, sebuah panitia yang di ketuai oleh Ki Hadjar Dewantoro pada tahun 1950 berhasil merancang dan kemudian ditetapkan sebagai Undang - Undang Pokok Pendidikan, dan pada tahun 1954 diberlakukan di seluruh NKRI. Perkembangan pembangunan pendidikan setelah tahun 1955 tidak bisa dilepaskan dengan kondisi politik bangsa. Bidang pendidikan kurang diprioritaskan mengingat masyarakat dan pememrintah lebih disibukan dengan masalah – masalah perpolitikan mulai dari konflik pemerintah dan DPR hingga pemberontakan di daerah – daerah (PERMESTA, DI/TII , Kahar Muzakar dll) . Usaha pembangunan pendidikan hanya sampai pada tataran konsep dan belum direalisasikan secara layak. Misalnya Prof Dr.Priyono menyusun rencana pengajaran yang dikenal dengan Sapta Usaha Tama, kemudian di rubah menjadi Panca Wardana, dan akhirnya menjadi program Panca Cinta. Program – program tersebut ternyata tidak memperbaiki bidang pendidikan, justru melahirkan konflik internal di kalangan tokoh- tokoh pendidikan yang pada waktu itu memang sudah ada perpecahan cara pandang. Program – program tersebut dilihat dan dicurigai sebagai upaya sadar untuk menghilangkan pendidikan agama. Tentu saja keadaan itu menjadi kontra produktif bagi pembangunan pendidikan. Memang ada upaya – upaya untuk meningkatkan pendidikan , terutama pada sarana dan prasaran pendidikan, tetapi kebijakan politik tetap menjadi panglima di dalam penentuan kebijakan pendidikan.

Orientasi pembangunan pendidikan mengalami perubahan ketika Suharto sebagai Presiden RI menetapkan pola pembangunan dengan sistem Pelita . Sebelum sistem tersebut digunakan, pembangunan pendidikan Indonesia merujuk kepada Tap MPRS tahun 1966 yang antara lain menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah ”membentuk manusia Pancasila Sejati ” dengan isi pendidikannya adalah (1) mempertinggi mental moral budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama;(2) mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan; serta (3) membina /memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Dari rumusan tersebut tampak jelas ada perubahan yang sifatnya mencoba memperbaiki dan menambah yang dianggap kurang dalam tujuan program pendidikan pada era sebelumnya, dimana pendidikan Agama dimuat secara eksplisit pada Tap MPRS 1966. Pada periode selanjutnya pembangunan pendidikan nasional di arahkan untuk mencapai tujuan ”pembentukan” manusia Indonesia yang ideal dengan kriteria antara lain (a) sehat jasmani dan rohani;(b) memiliki pengetahuan dan ketrampilan; (c) mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab; (d) menyuburkan sikap demokrasi, (e) mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur;(f) memperkuat kepribadian yang cinta bangsa dan manusia serta mempertebal semangat kebangsaan agar dapat membangun dirinya sendiri serta bersama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa berdasarkan atas Pancasila.

Mengingat stabilitas keamanan nasional relatif lebih baik setelah tahun 1966, maka pembangunan sektor pendidikan bisa berjalan lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya , dengan berdasarkan kepada nilai – nilai karakter dari tujuan pendidikan nasional tersebut. Sistem pendidikan mulai dari Tingkat kanak- kanak sampai perguruan tinggi dapat dijalankan dengan lancar dimana prioritas – prioritas pengembangannya di sesuaikan dengan tuntutan jaman. Pergantian kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perubahan jaman (sekalipun kebijakan tersebut seringkali di reaksi negatif terutama oleh masyarakat, karena ganti kurikulum identik dengan meningkatnya *social cost* para para orang tua). Pendidikan ketrampilan juga mendapat perhatian, dimana sekolah - sekolah kejuruan baik tingkat SLTP maupun SLTA dibangun di banyak tempat, meskipun sejak kurikulum 1984 keberadaan sekolah kejuruan tingkat SLTP dihilangkan. Dan ketika negara memperoleh pendapatan yang melimpah dikembangkan proyek SD Inpres untuk mempercepat pembangunan pendidikan dasar; selain itu

dilaksanakan juga proyek pengiriman siswa, guru, mahasiswa dan dosen untuk mengikuti program pertukaran maupun bea siswa luar negeri. Wajib belajar ditetapkan untuk anak usia SD.

Berbagai keberhasilan pembangunan sektor pendidikan menjadi catatan khusus terhadap pemerintahan Orde Baru, disamping tentu saja kelemahan dan bahkan kegagalannyapun menjadi bagiannya.

C.3. Eropa : Inggris.

Kelompok – kelompok non- kompromi di Inggris sedang semangat menopang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 17 dan 18. Dorongan untuk memadukan ilmu dan industri menghasilkan inovasi yang menjadi modal pokok transformasi masyarakat Inggris. Kecenderungan praktis pendidikan baru dan meningkatnya pengusaha kelas penting mendorong tindakan untuk meningkatkan bentuk-bentuk baru produksi . Selama masa pra-industri, sejarah mencatat universitas – universitas Inggris tidak simpatik terhadap pengetahuan baru yang telah menjadi model pemikir internasional di Inggris dan continental. Akan tetapi sekalipun pada awalnya tingkat pendidikan tidak setinggi pertumbuhan penduduk, secara kualitatif mempunyai semangat sangat penting dalam usaha menumbuhkan tingkah laku inovatif yang sangat banyak sumbangannya dalam rangka mengantarkan bangsa Inggris ke jalur modernisasi.

Antara tahun 1550 -1650, sekolah dasar (formal) mungkin didayagunakan secara luas oleh kelas yang lebih beruntung, karena mereka telah mendidik anaknya di rumah untuk sekolah grammer. Perluasan system pendidikan yang dapat mencapai seluruh masyarakat Inggris baru terjadi 3 abad setelah mulai pembangunan antara tahun 1830-1930. Smelser (1992) menduga bahwa tindakan pabrik tahun 1830-1840 telah berakibat perpisahan orang tua dengan anaknya dalam waktu yang cukup lama setiap harinya. Tepatnya pada tahun 1833 terjadi suatu gerakan aksi yang membuat para pengusaha akhirnya mendukung pelaksanaan bagi penyelenggaraan sekolah dasar anak – anak dari para ibu yang bekerja di pabrik – pabrik.

Jika selama ini mereka dijadikan tenaga kerja dengan bayaran sangat murah, bahkan seringkali upah pekerja anak dijadikan bagian dari pekerjaan ibunya di pabrik, maka anak – anak sejak aksi tersebut jam kerja di batasi dan dalam waktu tertentu mereka

bisa berada di sekolah dan tidak berada di pabrik- pabrik. Dan sejak itu secara perlahan pendidikan dasar mendapat tempat dalam perubahan sosial masyarakat Inggris. Dengan demikian tampak nyata hubungan antara pengurangan jam kerja (khususnya anak – anak) dengan perluasan pendidikan , khususnya pendidikan dasar dan gejala lain yang muncul adalah pemisahan dan penguatan sistem pendidikan formal dibanding masa – masa sebelumnya (Pipkin,1958).

Awal abad ke 19 universitas – universitas di Inggris kurang menyetujui pengajaran ilmu atau teknologi di sekolah – sekolah formal. Jurusan atau program untuk engineering pertama baru di sediakan pada tahun 1840 itupun di di Universitas Glasgow, sementara Cambridge sendiri baru tahun 1875 setelah ada pertunjukan atau perlombaan teknologi tingkat internasional pada tahun 1867. Sekalipun temuan – temuan dari Inggris mendapat penghargaan namun tempat terhormat di duduki oleh Perancis. Kenyataan itulah yang kemudian menggerakkan suatu aksi pentingnya pendidikan ilmu dan teknologi semakin di perluas ditingkat universitas. Pada akhirnya sejak tahun 1881 pendidikan ilmu dan teknologi menjadi bagian kurikulum di Cambridge dan Oxford dan di ikuti oleh 7 universitas terkemuka.

C.4. Asia : Jepang

Massa masyarakat Jepang pada fase prapembangunan terbanyak berada di desa. Sekalipun demikian selama periode Tokugawa terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang bisa baca tulis. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya sekolah – sekolah marga sebagai wahana bagi pendidikan para calon *Samurai*. Pada masa akhir Tokugawa hampir 40% laki – laki dan 15 % wanita bersekolah. Fase perubahan dasar terjadi ketika ketegangan serius muncul di tatanan masyarakat Jepang pada awal abad 18, berbarengan dengan mulai mengendornya kesatuan politik dan budaya pada periode Tokugawa (1703-1707), selain itu ada rasa tidak puas dengan keunggulan militer Barat menggoda kesadaran sebagian masyarakat untuk meningkatkan kemampuan Negara.

Satu abad sebelumnya di Jepang tumbuh pertentangan antar sekolah sekolah tinggi tradisional. Institusi Pendidikan Tinggi selama periode Tokugawa: *Tokyo Soeheiko* (Sekolah Damai dan Makmur) pusat ilmu pengetahuan Kung Fu Tse ortodoks di dominasi oleh keluarga Tokugawa. Sekolah marga tumbuh dengan cepat di akhir

periode Tokugawa, dan pada akhir 1850 terdapat 250 sekolah marga penentang Tokugawa, termasuk sekolah marga Mito dan Satsuma yang mementingkan kesusastraan dan sejarah Jepang.

Dalam masa yang sama muncul fenomena baru yang di kenal dengan filsafat *Shingaku*, yang mengakui prinsip – prinsip moral dan ethic yang terdapat dalam tulisan Kung Fu Tse, serta memandang suci pengetahuan. Selain itu dari filsafat ini lahir pula pandangan yang menghormati perdagangan, yang mana perdagangan dalam pandangan tradisional termasuk pekerjaan kurang terhormat.

Pengaruh ilmu pengetahuan Barat, nasionalisme sekolah – sekolah marga dan tantangan terhadap dominasi ortodoksi filsafat Kung Fu Tse menyebabkan ketidakpuasan terhadap tatanan masyarakat tradisional. Pada waktu Retorasi Meiji menurut Oassin (1985) jumlah penduduk pandai baca tulis telah meningkat. Pendidikan dasar formal penyebarannya berjalan cepat, berbeda dengan di Inggris. Dalam waktu 50 tahun setelah proses awal pembangunan , Jepang telah melaksanakan pendidikan dasar formal universal. Penggunaan sekolah dasar untuk mempercepat pembangunan lebih di sadari oleh Jepang dari pada Inggris.

Beberapa tahun setelah Restorasi Meiji di tetapkan jalur pendidikan wajib dan pada tahun 1872 telah dikeluarkan Undang –Undang pendidikan dengan preambul yang sangat progresif mendukung wajib belajar bagi semua warga. Dalam preambul antara lain tertulis bahwa :” Belajar dengan rajin adalah bagian dari upaya meraih kemakmuran dan kekayaan Ilmu Pengetahuan sebagai modal peningkatan diri ... Ditetapkan secara universal dimana di setiap desa tidak ada rumah tanpa di isi dengan kegiatan belajar dan tidak ada seorangpun dalam rumah yang tidak belajar.”

Pada awal Restorasi Meiji, Amerika Serikat adalah kiblat pembaharuan dan pembangunan pendidikan Jepang. 1870 pelajaran aritmetika, kesehatan dan ilmu alam di masukan dalam kurikulum pendidikan dasar. Para pemimpin Jepang menerima dengan cepat perluasan sekolah dasar untuk mengembangkan nilai – nilai yang sesuai dengan cepatnya perubahan masyarakat. Sekolah dasar memuja hal – hal baru, tetapi juga meneruskan tujuan yang ditetapkan untuk stabilitas keluarga. Perpaduan nilai – nilai baru dengan nilai – nilai tradisional dengan sukses sudah dilakukan oleh masyarakat Jepang. Nilai tersebut antara lain , meningkatkan pengakuan terhadap status yang

diperoleh (*achieve status*) bukan karena kelas, umur dan gender; meningkatnya analisa rasional; dan peningkatan rasa nasional sebagai lawan lokal dan simbol kebanggaan.

Pada tahun 1900 menurut Dairaoku dalam Murray (1999) Jepang telah sempurna melaksanakan wajib belajar 4 tahun. Dan 1908, 40 tahun setelah periode Meiji, pendidikan wajib ditingkatkan secara efektif menjadi 6 tahun. Jadi ketika organisasi Boedi Oetomo lahir maka Jepang sudah sukses melaksanakan wajib belajar 6 tahun !

C.5. Afrika : Afrika Tengah

Pembahasan geokultural Afrika Tengah yang membentang mulai dari Gurun Sahara, sebelah Utara, hingga Republik Afrika Selatan di sebelah Selatan, pada umumnya sangat sedikit dirasakan hasil pembangunannya. Merujuk klasifikasi Melville Herskovits (1960) tentang kebudayaan Afrika, maka wilayah Afrika Tengah sebagian termasuk masyarakat dengan tradisi penggembala, dan sebagian lagi masyarakat dengan tradisi pertanian. Sampai abad 20 hubungan bangsa Afrika dengan Eropa hanyalah secara sporadis dan secara relative skala kecil dibandingkan dengan hubungan Eropa dengan Asia Selatan, Asia Tenggara maupun Amerika Latin.

Di abad 18 dan 19. Walaupun ada beberapa kenyataan kebudayaan yang sangat mengagumkan, tumbuh subur di Afrika sekitar 800 sampai 1000 tahun yang lalu dan kekuasaan yang sangat kuat, namun hingga awal abad 20 Afrika Tengah tidak dapat membanggakan tingkat perkembangan sumber alamnya atau tidak mempunyai kebanggaan warisan pendidikan formal yang ekuivalen dengan Asia dan Amerika Latin. Justru yang ada pada periode tersebut adalah Perancis dan Inggris muncul sebagai pemenang utama di dalam kancah perebutan menguasai Afrika Tengah.

Pasca Perang Dunia II mulai tampak adanya perubahan dimana semakin banyak mahasiswa Afrika dan pegawai – pegawai pemerintah yang mulai berpartisipasi mengembangkan dan mengintensifkan pengalaman langsungnya dari bangsa- bangsa Barat. Meskipun demikian unsur kontinuitas maupun perubahan masih sangat terlihat dengan jelas pada kelembagaan tradisional dalam bentuk – bentuknya yang diteruskan oleh keluarga, agama animistis dan agama leluhur, pengaturan kekuasaan asli dan tata cara resmi lain secara lebih terinci. Kelembagaan dan kebijaksanaan colonial seringkali

menghadapi kekuatan yang merintang kebutuhan adaptasinya dengan pandangan – pandangan bangsa Afrika.

Kebijaksanaan Kolonial Inggris secara teoritis di dasarkan atas penguasaan tak langsung, dalam arti bahwa kebijaksanaan pemerintah sebagian besar, diselenggarakan dengan perantara kelembagaan – kelembagaan pribumi yang ada. Sehingga secara berangsur - angsur para pemimpin tradisional masyarakat dimasuki ajaran – ajaran baru dan akhirnya benar – benar melepaskan prasangka dan kelembagaannya, yang kemudian pelan – pelan bentuk kelembagaannya berubah menuju ke bentuk kelembagaan yang lebih moderen (maju).

Sebagai kelanjutan penguasaan tak langsung dikembangkanlah doktrin “diferensiasi” dimana kebijaksanaan pendidikan di dasarkan atas pemisahan – pemisahan kelembagaan antara bangsa Afrika dan Eropa, tentu bagi bangsa Eropa bentuk lembaga pendidikannya lebih baik. Kebijakan pendidikan yang di lakukan Inggris tidak dimaksudkan kepada pencapaian menciptakan keteraturan pendidikan karena dalam prakteknya kebijaksanaan tersebut selalu dikaitkan dengan keuntungan yang bisa diperoleh pemerintah Inggris. Oleh karenanya jumlah dan tipe pendidikan pada umumnya di tentukan oleh inisiatif pemerintah kolonila dan kemauan penduduk kolonial untuk memberikan dukungan financial terhadap persekolahan.

Hambatan yang nyata bagi kemajuan pendidikan kaum pribumi di wilayah Afrika Tengah - Inggris adalah yang berkaitan peraturan ujian akhir dengan kurikulum sama baik yang diselenggarakan di London maupun di negeri jajahan. Keterpaksaan mentaati kurikulum yang di-Inggriskan tidak bisa dihindari apalagi di dorong adanya kenyataan terhadap pngakuan lulusan yang diberi status lebih di dalam tatanan kehidupan masyarakat jajahan.

Doktrin “ asimilasi” adalah merupakan arah kebijaksanaan kolonial Perancis. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan baik kesatuan politik, sosial, pemikiran maupun praktek budaya daerah jajahan di sepebrang lautan dengan Perancis. Sejalan dengan prinsip asimilasi, ide penggabungan dikembangkan sebagai dasar kebijaksanaan pendidikan. Sehingga didirikanlah sekolah yang bersifat terbuka bagi seluruh kelompok etnik, dengan bahasa Perancis sebagai bahasa pengantar sejak dari sekolah rendah, dan kurikulum serta buku-buku pelajaran disusun sesuai dengan pola Perancis. Dengan pola

ketergabungan itulah maka kelompok elite Afrika Tengah yang berpendidikan menempati peranan kepemimpinan dan diberi hak sepenuhnya serta istimewa sebagaimana warganegara Perancis. Namun demikian penjajah tetap penjajah, sekalipun kebijakan pendidikan ala Perancis berbeda dengan Inggris, namun ada kesamaan yang jelas, yakni pendidikan apapun bagi kaum pribumi tetap untuk kepentingan dan keuntungan penjajah. Betapa tidak, dari penduduk pribumi yang terdidik, Perancis memperoleh tenaga kerja terdidik dengan upah yang murah.

Setelah Perang Dunia II ada perubahan kebijakan pendidikan Perancis di negara – negara koloninya. Berdasarkan hasil laporan sebuah Komite yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1948, ditetapkan bahwa pendidikan di seluruh wilayah Perancis seberang lautan harus disesuaikan dengan aktivitas ekonomi. Misalnya di wilayah Afrika Katulistiwa, pendidikan di arahkan pada pendidikan keahlian (*technical education*) pertanian, sementara untuk wilayah Afrika Barat dan Madagaskar di tekankan pada pendidikan tentang *polyvalent* (jenis – jenis kimia). Dan sejak dikeluarkan peraturan tersebut maka pendidikan kejuruan (*vocational cation*) dan pendidikan pertanian mengalami perkembangan di Afrika - Perancis. Selama proses pertumbuhan pendidikan ini, pemerintah memberi sokongan berupa dana bantuan langsung, yaitu dengan memperbesar beasiswa bagi siswa – siswa Afrika untuk belajar di Perancis, dan juga dengan menambah guru- guru Perancis untuk dikirim ke daerah jajahan.

Fakta lain dari upaya pembangunan pendidikan di Afrika Tengah, tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi peranan para misionaris tidaklah kecil. Bahkan di wilayah yang dikuasai Belgia, pendidikan di serahkan sepenuhnya kepada para misionaris. Setelah Perang Dunia I mereka mendapat pula subsidi dari pemerintah. Pemaknaan pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh kaum misionaris adalah sebagai bagian dari alat dan usaha dalam rangka meng-Kristenkan penduduk pribumi. Oleh karena itu mereka lebih fokus pada pengembangan pendidikan sekolah dasar, sedangkan sekolah lanjutan ada juga tetapi tidak segenar upayanya di pendidikan sekolah dasar.

Faktor – faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Afrika Tengah antara lain (1) Dampak Kolonisasi Bangsa Eropa (2) Perbedaan bahasa (setiap suku sekalipun anggotanya hanya 100 orang memiliki bahasa sendiri, sehingga

tidak kurang ada 800 bahasa/dialek di Afrika Tengah) (3) Urbanisasi dimana para pemuda desa semakin banyak yang pergi ke kota-kota, dan (4) yang tidak kalah pentingnya adalah variasi kebudayaan dan keterbukaan untuk menerima perubahan .

Arah baru pembangunan pendidikan di Afrika tidak bisa dilepaskan dari ide dan pemikiran Julius Nyerere, kelak menjadi presiden Tanzania, yang mengajukan formula baru pendidikan bagi bangsa Afrika. Inti dari gagasannya adalah “ Pendidikan Untuk Kesadaran Diri.” Adapun wujud dari gagasannya tersebut dia menganjurkan bahwa setiap sekolah sebagai bagian yang integral harus memiliki perencanaan sendiri , serta dilengkapi dengan lahan pertanian atau bengkel kerja yang dapat menyediakan makanan yang diperlukan masyarakat dan dapat mendatangkan kenaikan pendapatan (Nyerere,1967) . Kalau di lihat baik dari tataran pemikiran maupun prakteknya , ide Nyerere sama dengan yang dilakukan oleh Mochamad Syafei dengan sekolah “Kayutanam” di Sumatera Barat yang didirikan sekitar awal abad ke-20.

C.6. Amerika Latin

Pada pertengahan abad ke-19, Amerika Latin dikuasai oleh pemerintah Spanyol dan Portugal, dimana kebijakan kolonialnya didasarkan pada keinginan untuk menciptakan keuntungan ekonomi, menyebarkan ajaran Kristen kepada penduduk Indian, dan menciptakan kebudayaan di Dunia Baru persis seperti di tanah airnya sendiri. Walaupun banyak penduduk Indian yang sudah memiliki peradaban yang maju, tetap saja mereka umumnya dianggap belum beradab. Kelembagaan mereka dirusak, bahasa dan agama mereka diganti. Struktur masyarakat di Spanish Amerika (wilayah Amerika yang berpenduduk Spanyol) terpelihara dengan kokoh dimana kelas sosial atau stratifikasi sosial menjadi sangat jelas. Bangsa Kaukasis menjadi *upper class* yang menguasai kegiatan ekonomi yang berproduktivitas tinggi. Elite kelas ini lahir di Spanyol (*Peninsulares*), dan hampir menduduki semua jajaran kepemimpinan pemerintah maupun gereja. Berikutnya secara hierarkis adalah *Creollos* (keturunan Eropa yang lahir di Spanish Amerika) menduduki middle class, kemudian *Mestizos* (Kaukasis-Indian) menduduki *upper lower class* , sedangkan bangsa Indian dan Negro (*Mulato*) menempati posisi sosial paling bawah.

Lain lagi struktur masyarakat di wilayah Portugis Amerika (Brazil), dimana baik gereja maupun pemerintahan tidak kokoh atau tidak terorganisir dengan baik. Kepentingan Portugal di daerah koloni Brazil banyak memberikan peluang bagi tumbuhnya warisan inisiatif yang bersifat individu, sehingga berkembang suatu kekuatan feodalisme familistik, dimana pemilik perkebunan menjadi pusat dari seluruh kekuasaan dan kesetiaan di wilayahnya. Sehingga kalau di bandingkan dengan Spanish Amerika maka Portugal Amerika *Brazilian class* dan garis rasial tak terlalu terlihat menyolok dan tidak begitu membedakan peninsulares dan bangsa Eropa yang lahir di daerah jajahan.

Pada jamannya penjajahan pendidikan penduduk merupakan tanggungjawab Gereja. Dan yang paling terkemuka dan besar andilnya adalah kelompok Jesuit (suatu mazhab Katolik yang keras dan berdisiplin). Sekalipun penyelenggaraan sekolah di dasari oleh kesadaran kelas dan sistem *multi-track* yang ada di Spanyol dan Portugal, namun para pendidik Katolik mencoba mementingkan sekolah yang mampu melayani seluruh masyarakat tanpa memperhatikan kelas sosial (*Common school*). Pendidikan untuk masyarakat kelas bawah sepenuhnya di selenggarakan oleh Gereja. Untuk bangsa Indian dan Negro dilengkapi dengan pelajaran pertukangan, bahasa Spanyol, dan keagamaan, sedangkan untuk *Mestizo* dan *Mulato* dilengkapi dengan ketrampilan berdagang, tiga R's dan agama.

Para paderi Jesuit selain mendirikan sekolah dasar juga membuka colegio yang menjadi simbol pendidikan menengah kontemporer di Amerika Latin, dan mempersebahkan kurikulum *Arts* (kesusastraan dan filsafat) liberal tradisional kepada orang-orang Spanyol, Portugis dan elit *creollo*. Walaupun pendidikan tinggi yang baik hanya dapat diperoleh di Eropa, namun universitas-universitas penting didirikan di Spanish Amerika. Dan dengan perantaraan lembaga itulah akhirnya Universitas **Bologna** yang bersifat theologis menjadi Dunia Baru bagi masyarakat Amerika Latin. Pada awalnya universitas-universitas Amerika Latin menitik beratkan schoolastic dan kurang terpengaruh oleh filsafat serta kesusastraan zaman Renaissance dan zaman Reformasi jika dibandingkan dengan universitas Eropa Utara (sumber tradisi universitas-universitas di Amerika Utara). Perbedaan lainnya adalah jika *Arts* dan *Science* di

Amerika Utara menjadi dasar bidang – bidang studi profesional maka di Amerika Latin dua kajian tersebut menjadi selingan bagi studi tersebut.

Yang unik dan patut di perhatikan dari sejarah pendidikan di Amerika Latin periode tahun 1950-an adalah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada korelasi antara pendidikan dan tingkat urbanisasi. Semakin tinggi urbanisasi maka semakin tinggi pula tingkat kependidikan suatu masyarakat . Sebagai bukti Colombia, Equador, Hondoras, Parguay, Peru, Argentina, Brazil mempunyai index urbanisasi yang rendah dan juga lebih rendah tingkat pendidikannya. Tapi lebih lanjut dikatakan bahwa untuk kasus Costa Rica dianggap pengecualian. Perkembangan pendidikan di Costa Rica, dimana memiliki populasi pedesaan yang tinggi tetapi dengan tingkat kependidikan juga tinggi. Daerah geografisnya kecil, keadaan politik stabil, proporsi penduduk keturunan Eropa tinggi, dan pengeluaran budget untuk pendidikan yang tinggi kemungkinan yang menjadi faktor terciptanya kondisi khusus di negara tersebut.

Sejak tahun 1960-an pendidikan di Amerika Latin pada umumnya terus berkembang dengan pesat. Bukti upaya tersebut menurut Nash (1983) dapat dilihat dari perubahan yang dramatis dari besarnya anggaran pendidikan dari sebagian besar negara di Wilayah tersebut dari tahun ke tahun pada periode setelah tahun 1960-an. Dalam memandang masalah – masalah pendidikan Amerika Latin dan upaya – upaya yang telah dilakukan dalam menunjang pembangunan, ada empat hal pokok yang perlu di cermati yakni (1) sekalipun banyak hambatan , namun pemerintahan dan para pemimpin nasional memiliki tekad untuk meningkatkan kemampuan ekonomi bagi peningkatan standar pendidikannya; (2) penyebaran kesempatan pendidikan secara luas di seluruh daerah dan kelompok sosial serta kelompok – kelompok etnis berjalan lamban; (3) sistem pendidikan belum sepenuhnya menjawab tantangan perkembangan ekonomi, ilmu dan teknologi, dengan kata lain belum mampu menciptakan masyarakat yang ilmiah dan lembaga – lembaga pendidikan spesialis; dan (4) walaupun kelemahan dan masalah – masalah yang di hadapi tersebut, namun Amerika Latin relatif lebih makmur di antara negara – negara terbelakang di era tahun 1960-an. Tingkat keahlian orang – orang Amerika Latin cukup tinggi berdasarkan standar internasional.

C.7. Amerika Utara : Amerika Serikat .

Amerika Serikat pada awalnya, ketika proklamasi kemerdekaan di dengungkan, terdiri dari 13 negara bagian dan sekarang ini telah memiliki 50 negara bagian, dimana setiap negara bagian memiliki sistem pemerintahan dan sistem kebijakan pendidikan sendiri – sendiri. Perang kemerdekaan Amerika pecah tahun 1775 dan tahun 1776 diproklamasikan sebagai negara yang merdeka bebas dari cengkraman kerajaan Inggris. Setelah proklamasi tidak serta merta perjalanan menjadi mulus, karena baru delapan tahun kemudian keadaan menjadi semakin membaik. Selama delapan tahun keadaan ekonomi mengalami kekacauan demikian pula bidang pendidikan tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Akibat lain dari selesainya perang kemerdekaan adalah mengemukanya persaingan antar negara bagian. Masing – masing menganggap negaranya yang terpenting dan paling banyak jasanya dalam perjuangan tersebut.

Ketika didirikan pemerintah federal, timbullah keinginan pada pemimpin – pemimpin pemerintahan untuk menjadikan pendidikan sebagai alat untuk menggalang persaan persatuan dengan menciptakan kesadaran warga negara yang insyaf akan kedudukannya sebagai warga dalam sebuah republik. Juga disepakati bahwa mereka meyakini pendidikan akan dapat membantu pembangunan pertanian dan perdagangan negara baru itu. Sekalipun banyak hambatan yang harus diatasi dalam pembagunan pendidikan seperti tempat tinggal penduduk yang berjauhan dengan kondisi transportasi yang masih sederhana sehingga hubungan lalulintas sangat buruk, akhirnya lambat laun perubahan – perubahan yang diharapkan baik di lapangan politik, ekonomi, sosial mulai tampak. Hal itu berpengaruh besar terhadap perkembangan dunia pendidikannya.

Manakala gelombang imigrasi orang – orang Eropa ke Amerika Utara, masing – masing kelompok imigran membawa dan melanjutkan sistem pendidikan dari daerah asalnya. Hampir sebagian pendidikan kemudian di selenggarakan oleh dewan gereja – gereja. Yang paling terkenal pada jaman itu adalah sekolah ”*Parish*” dimana buku-buku, guru dan peraturan di tentukan oleh dewan Gereja. Adapun pelajaran utama yang diberikan adalah agama disamping berhitung, membaca dan menulis. Pada periode awal ini hubungan antara sekolah dan gereja tidak terpisahkan. Sedangkan sekolah pemerintah yang pertama baru didirikan tahun 1683 di negara bagian Philadelphia. Dengan semakin membanjirnya para imigran semakin cepat pula pembentukan dan pembangunan kota –

kota. Ditambah lagi dengan pesatnya industrialisasi maka tidak pelak lagi kota – kota industri tumbuh berkembang dengan pesat.

Sekolah – sekolah yang didirikan gereja dan swasta tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perkembangannya, sehingga perlu didirikan sekolah – sekolah baru. Pendirian sekolah – sekolah tentu membutuhkan dana. Dan untuk kepentingan itulah pembangunan pendidikan harus menjadi komitmen seluruh bangsa, dan diharapkan pemerintah mengambil peran yang lebih banyak. 1744 negara Connecticut mempergunakan segala penghasilan dari bea minuman keras untuk mengongkosi sekolah – sekolah. Negara New Orleans umpunya memepergunakan pajak pertunjukan sandiwara untuk maksud itu, bahkan ada negara bagian yang menggunakan uang yang didapat dari lotere untuk membangun pendidikannya. Sejak itu didirikanlah bank – bank pajak buat pendidikan. Melihat potensi pajak sebagai sumber pembiayaan pendidikan, maka muncul pula kesadaran pentingnya pajak umum yang peruntukannya bagi pendidikan. Sekalipun ada protes di sana sini, namun keyakinan akan pentingnya biaya dalam membangun pendidikan semakin meningkat.

Pada tahun 1797 negara bagian Vremont mengusulkan adanya bantuan pendidikan dari pemerintah, sehingga dengan demikian pendidikan umum buat rakyat akan bebas dari pembayaran. Bahkan ketika para buruh merasakan pelayanan dan kemampuan untuk menyekolahkan anak – anaknya sangat mnim , maka pada tahun 1830 mereka menuntut didirikan sekolah – sekolah kejuruan yang bebas dari pembayaran. Akhirnya satu persatu negara bagian menempatkan pembangunan pendidikan menjadi salah satu program penting dalam penetapan kebijakan umum. Sebagai contoh pada tahun 1848 negara bagian Winconsin menetapkan biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Akhirnya sekolah – sekolah umum dibiayai oleh negara dan bebas dari pemabayaran uang sekolah, terbuka buat segala warganegara terutama berlaku di sebagian besar wilayah Utara, sedangkan di wilayah Selatan warganegara Amerika keturunan negro masih dilakukan diskriminasi dan hambatan – hambatan lainnya bahkan higga abad ke -20 seperti Peristiwa ”*Little Rock*” (1960) dan Peristiwa ” James Meredith” seorang Amerika keturunan Negro yang di hambat masuk keperguruan tinggi , menjadi skandal kebangsaan yang memalukan bagi bangsa Amerika.

Kemajuan pesat dan perubahan besar dalam bidang ekonomi menumbuhkan kebutuhan akan sekolah menengah. Hingga tahun 1840 di seluruh Amerika Serikat jumlah sekolah menengah tidak lebih dari selusin. Jika pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh gereja, maka sekolah menengah banyak dikembangkan oleh lembaga ataupun perseorangan. Sekolah menengah yang pertama dibangun adalah "*Latin Grammar School*" (LGS) yang tujuannya adalah mempersiapkan anak – anak untuk masuk "*College*". Hingga tahun 1840 di seluruh Amerika Serikat hanya ada selusin sekolah tingkat menengah. Di sekolah jenis ini yang diajarkan materinya sangat klasik dan bahasa Latin sangat diutamakan. Akan tetapi seiring dengan waktu dimana kebutuhan masyarakat semakin berkembang didirikanlah sekolah menengah yang memfokuskan diri untuk mendidik guru.

Di sekolah Guru diberikan mata pelajaran yang lebih luas dibanding di LGS, bahkan menurut Said dan Affan (1987) di lihat dari mata pelajaran yang diberikan di sekolah guru tersebut, menjadikan lulusannya dituntut untuk menjadi guru yang "*all-round*". Betapa tidak mulai dari pelajaran keguruan sampai pelajaran yang berkaitan dengan keahlian bagi insinyur dan ilmu – ilmu yang terkait dengan udara dan cuaca diajarkan juga di sekolah guru. Tahun 1839 Sekolah Guru yang pertama didirikan di Amerika Serikat yang ada di negara bagian Massachusetts – baru tahun 1860 sekolah ini memiliki gedung sendiri berikut asrama dan 1880 mereka mempunyai murid 240 orang serta 10-12 tenaga pengajar.

Kurikulum sekolah Guru kemudian mengalami pembaharuan setelah beberapa pendidik kembali dari peninjauan mereka ke Eropa. Cita – cita pembaharuan digelorakan dan pemikiran – pemikirannya di bukukan bahkan dijadikan pedoman pengembangan sekolah guru. Di penghabisan abad ke 19 beberapa sekolah guru di naikan menjadi *college* dan dijadikan bagian dari universitas. Misalnya *Teachers College* yang di New York dijadikan bagian dari Columbia University pada tahun 1898. Dan 1925 hampir lebih dari setengah sekolah guru sudah ditingkatkan menjadi *Teachers College*.

Kemajuan masyarakat akhirnya menuntut juga peningkatan pendidikan yang lebih tinggi untuk umum. Sekolah – sekolah tinggi memang mulai didirikan sejak tahun 1736, seperti Harvard, dan ketika Amerika Serikat merdeka sudah ada 9 perguruan tinggi yang sebagian besar mendidik para calon pendeta. Sekolah tinggi pada awalnya memang

didirikan melulu untuk mempersiapkan para pendeta, bahkan pada tahun 1800 Harvard masih mengharuskan mata kuliah agama, ilmu pasti dan bahasa Latin dan diberikan oleh rektornya sendiri. Sehingga hingga 50 tahun usia keberadaannya hanya punya 20 orang mahasiswa dan rektornya memberikan kuliah dalam hampir sekalian mata kuliah. Kecenderungan mengarahkan perguruan tinggi pada pola yang sama dengan Harvard dapat dimaklumi, karena perguruan tinggi umumnya didirikan oleh golongan agama dan pemimpin serta dewan kuratornya ditetapkan oleh golongan agama.

Keadaan mulai berubah, jika sampai akhir abad ke 19 perguruan tinggi masih mengutamakan kepentingan golongan agama yang bersangkutan daripada kepentingan negara, maka di abad ke 20 seiring dengan semakin meluasnya semangat demokrasi, yang menghendaki sekolah – sekolah tinggi diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah dan meningkatnya kesadaran bahwa pendidikan tinggi adalah tempat persemaian tenaga – tenaga intelektual yang diperlukan bagi masa depan bangsa, maka akhirnya penyelenggaraan perguruan tinggi juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah terutama dalam aspek pengawasan dan pengelolaannya.

Semakin meningkatnya perhatian masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan pendidikan memerlukan infrastruktur yang lebih khusus mengelola pendidikan. Maka munculah institusi – institusi yang terkait dengan hal tersebut. Sebagai contoh berdirinya ” *District Board Of Education*” di setiap negara bagian yang kemudian didirikan pula ” *State Board Of Education*” di tingkat pemerintah federal. Wewenang badan ini sangat luas mulai dari memungut dan menggunakan pajak untuk pendirian sekolah sampai pada penentuan kurikulum serta pengangkatan guru. Pengawasan sekolah – sekolah oleh pemerintah mulai juga mendapat sokongan dari masyarakat. Badan inipun berhasil merancang model persekolahan dengan sistem kelas, dimana sebelumnya tidak dikenal.

Pada bentuk awalnya sistem tersebut dirancang terdiri dari empat tingkat persekolahan yakni *primary*, *secondary*, *high school* dan perguruan tinggi dengan masing – masing lama belajarnya tiga tahun. Kemudian lama belajar di sekolah tingkat rendah dirubah di masing – masing negara bagian, ada yang 6 tahun bahkan ada yang sembilan tahun. Setelah diberlakukannya Undang - Undang Pendidikan tahun 1860 maka lama

pendidikan pada setiap tingkat ditetapkan sama di seluruh negara bagian. Untuk sekolah rendah lamanya 8 tahun, sekolah menengah 4 tahun dan perguruan tinggi 4 tahun.

Dari sejarah perjalanan badan tersebut tidak bisa dilepaskan peranan Horace Mann (Massachusetts) dan Henry Bernard (Connecticut) , dimana pengaruh dua tokoh tersebut ikut mewarnai dengan jelas perkembangan pendidikan di Amerika Serikat abad ke 19, lebih – lebih di Amerika Bagian Utara . Mereka pula arsitek lahirnya Undang - Undang Pendidikan tahun 1827. Melalui upaya mereka mempelajari pemikiran dan praktek pendidikan di Eropa (sama fenomenanya ketika tokoh – tokoh Jepang pada masa dan pasca restorasi Meiji melakukan muhibah dalam rangka belajar tentang pendidikan baik di Amerika maupun Eropa) di kenalkan metode, pendekatan dan teori pembelajaran baru seperti metode Pestalozzi dan Frobell.

Metode Frobel kemudian dikembangkan oleh John Dewey secara intensif di sekolah percobaan universitas yang dipimpinnya di Chicago. Dari hasil ekperimennya kemudian dia dikenal sebagai tokoh pendidikan yang pragmatis, yang menenmpakan pentingnya lingkungan masyarakat dalam memepertimbangkan tujuan pembelajaran. Pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan lingkungannya, sehingga yang di utamakan adalah pendidikan ketrampilan yang bermanfaat bagi para siswa kelak kalau mereka terjun ke dunia nyata yakni masyarakat. Pemikiran John Dewey tersebut tidak hanya dikembangkan di Amerika Serikat tapi menyebar ke seluruh dunia. Prinsip sekolah sambil bekerja (*learning by doing*) atau *Do School* menjadi trend pada masa itu dan mempengaruhi aliran pemikiran pendidikan.

C.8. Refleksi

Pada umumnya di negara – negara sedang berkembang dalam membangun sektor pendidikan kurang belajar dari sejarah pendidikannya, termasuk Indonesia. Kurangnya belajar dari sejarah pendidikan kemungkinan antara lain di sebabkan oleh salah satu Dari perbincangan para pemimpin negara lebih di fokuskan pada pembangunan bagaimana merubah kondisi ekonomi bangsanya menjadi lebih baik dari yang ada sekarang. Disamping masalah ekonomi, politik juga tidak luput dari sorotan pembahasan, karena kebijakan politik di yakini akan menentukan pola kebijakan ekonomi. Sementara hal pendidikan masih dianggap prioritas ”berikutnya”. Berbeda dengan negara – negara yang sudah maju; Jepang, Inggris dan Amerika Serikat sebagai negara maju di dunia dewasa

ini. jika ditilik dari sejarah perjalanannya, mereka mengambil keputusan yang tepat dimana sektor pendidikan sejak awal menjadi hal utama yang di perhatikan ketika pembangunan di laksanakan.

Dari kajian fakta – fakta sejarah tersebut terbukti bahwa pendidikan memiliki peranan sangat penting di dalam mengantar suatu bangsa menjadi maju. Pendidikan dapat dikatakan turut membentuk jiwa suatu bangsa di masa datang . Pendidikan telah teruji mampu membawa dunia dari kegelapan dan kesempitan menjadi dunia yang benderang dan lapang, global dan universal. Berdasarkan keyakinan tersebut maka harapan yang paling besar dalam upaya pembangunan suatu bangsa tidak ada pilihan lain kecuali jatuh pada usaha – usaha pendidikan. Adapun masalah – masalah yang dihadapi oleh Negara – negara sedang berkembang dalam membangun sektor pendidikannya antara lain adalah :

- ✚ Kurangnya guru yang kualifait
- ✚ Kegagalan sekolah dalam memelihara siswa
- ✚ Keadaan kurikula yang tidak sesuai
- ✚ Ketimpangan kemajuan desa dan kota
- ✚ Partisipasi wanita dalam perkembangan pendidikan
- ✚ Mengelompoknya lulusan pendidikan tinggi pada birokrasi pemerintahan dan jabatan tinggi
- ✚ Kukuhnya konservatisme di dalam nilai yang mendasari system pendidikan
(Kadir dan Ma`sum, 1982)

D.Penutup

Sekalipun setiap Negara memiliki karateristik yang unik dalam membangun bangsanya, namun pendidikan telah mengambil tempat yang penting di dalam prosesnya. Selain itu jiwa jaman dari setiap perubahan memberikan titik tekan terhadap prioritas pembangunan pendidikan.

Budaya secara jelas mempengaruhi pandangan dan pemikiran tentang pendidikan. Struktur, stratifikasi dan mobilitas social masyarakat tidak bisa dipisahkan dari pembangunan pendidikan. Demikian pula perkembangan pemikiran seringkali menjiwai dan menginspirasi pendidikan pada jamannya.

Di Negara – Negara Asia dan Afrika aspek kolonialisme telah ikut secara nyata mempengaruhi perkembangan pendidikan baik pada masa penjajahan maupun setelah

kemerdekaan. Melalui penelusuran sejarah pendidikan, akhirnya harus diakui bahwa ada perbedaan percepatan pembangunan pendidikan di masing – masing wilayah.

Daftar Pustaka

- Abudin,Nata.Prof.DR.M.A. 2004. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bradjanagara, Sutedjo. 1956. *Sedjarah Pendidikan Indonesia*. Jogyakarta: Badan Kongres Pendidikan Indonesia .
- Buchori,Muchtar.2007. *Evolusi Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta:Insist Press.
Coleman (1986)
- Djumhur, I dan Drs.H.Danasuparta.1976. *Sejarah Pendidikan*. Bandung:CV Ilmu.
- Egon , Philip. 2004. *Education and Human Relationship*. New York : Dutton.
- Furnivall,J.S. 1944. *Netherland India : Study Of plural Economy*.
Cambridge: Cambridge UP.
- Hasan,S.H.helius Sjamsuddin dan Drs Kosoh S.1996. *Sejarah Pendidikan Indonesia*.Jakarta: Depdiknas.
- Herskovits, Melville.1960. *Africa : The Struggle for Better Future*. Johanesburg: Books Fair.
- Iyengar,K.R Srinivasa. *Rabindranath Tagore* .Penerjemah Abd Muhid.Pasuruan: Pedati.
- Kadir dan Ma`sum. 1982. *Pendidikan di Negara – Negara Berkembang*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Lombard, Dannys. (1996). *Nusa Jawa Silang Budaya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama .
- Mahmud,Drs dan Tedi Priatna.2005.*Pemikiran Pendidikan Islam*.Bandung:Sahifa
- Mansur,Dahlan dan M.Said.1989. *Mendidik Dari Zaman Ke Zaman*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Mastuhu,Prof,DR.M.Ed. 2003.*Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*.Jogyakarta:Safiria Insania Press.
- Munir,DR.AbdulMul Khan.2002. *Nalar Spritual Pendidikan:Solusi Problem Filosofi Pendidikan Islam*.Jogyakarta:PT Tiara Wacana.
- Murray, Henry.1999. *Japan In Modern History*. Philadelphia : Longstreet.
- Nasution,Prof.DR. 1985. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung:CV Jemars.
- Nizar,Samsul,DR.M.A.H. 2005. *Sejarah Dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam : Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia*. Jakarta : Quantum Teaching.
- Nyerere, Yulius. 1989. *Tanzania : The Heart of Afrika*. Capetown: Dualis Publishing.
- Oassin, Ochiro. 1985. *Meiji Restoration : Beyond Education*. Tokyo : Tadehashi Press.
- O`Neil,Willem F. *Ideologi – Ideologi Pendidikan* .Alih Bahasa Omi I Naomi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Palmer.A.Joy.2003. *50 Pemikir Pendidikan: dari Piaget Sampai Masa Sekarang*.Jogyakarta:Jendela.
- Pipkin, Robert.1958. *England : Post Industrial Revolution*. London : Longmans
- Poeponegoro,Marwati D dan Nugroho Notosusanto. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia*.Jakarta : PN Balai Pustaka.Jilid 1 – 6.
- Purbakawatja, R.Sugarda,Prof. *Aliran Baru Dalam Pendidikan Dan Pengajaran*.

- Bandung : Ganaco N.V.
- Ritzs, Conrad. 2001. *Education and Social Change in the Developing Countries*. London: Longman.
- Said, Muh dan Junimar Affan. 1987. *Mendidik Dari Zaman Ke Zaman*. Bandung : Jemars Silaban, Sintong, S.G. Suka dan Parulian Donald. 1993. *Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Dasa Media.
- Soemanto, Wasti dan Soeyarno. 1983. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soegiono. 1993. *Tokoh –Tokoh Pendidikan Dunia*. Bandung: CV Ilmu.
- Soejono .A.G. 1978 . *Aliran Baru Dalam Pendidikan*. Bandung : CV Ilmu
- Smelser, Henry. 1992. *Sociology : Introduction* . Penerjemah Sutinah. Capetown: Broadfield Inc.
- Supriadi, DR. Dedi, ed. 2002. *Sejarah Pendidikan Teknik Dan Kejuruan Di Indonesia*. Jakarta: DPMK.
- _____, ed. 2003. *Guru Di Indonesia, Pendidikan, Pelatihan, dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta: PT Geranusa Jaya.
- Steinbrink, Karel. A. 1986. *Pesantren, Madrasah , Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES
- Tilaar, H.A.R. 1995. *50 Tahun pembangunan pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan* . Jakarta: PT Gramedia.
- Wawan, Darmawan. Drs. M. Hum. 2007. *PGRI Dan Nasib Guru*. Bandung: Salamina Press
- Wolters, J.B. 1954. *Sriwidjaya*. Oxford : Oxford University Press.
- Zuhairini, Dra, dkk. 1997. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
-
- “*Mengenal Taman Siswa*” Seri 1 dan 2 . 1997. Bidang Penelitian Dan Pengembangan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. Yogyakarta.
- “*Sejarah Pendidikan*” oleh Helius Sjamsuddin. 2005. Bandung . Makalah .